

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum terhadap praktik hubungan industrial di Indonesia. Namun pasca pemberlakuan undang-undang tersebut, kondisi perburuhan tidak semata-mata menjadi lebih baik. Fleksibilitas kerja yang menjadi salah satu semangat undang-undang tersebut kemudian menimbulkan masalah baru, khususnya dalam bentuk sistem kerja dan pengupahan melalui PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terlebih, peran pemerintah daerah dalam menangani masalah tersebut juga terlihat minim. Pada sisi lain, buruh juga menekan pemerintah untuk dapat menangani masalah secara cepat dan efektif. Adanya kepentingan buruh yang diarahkan kepada pemerintah ini kemudian menimbulkan interaksi antar keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai fokus untuk mendeskripsikan pola hubungan yang terjalin antara gerakan buruh dengan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di daerah terbatas sejak adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembatasan kewenangan ini menyebabkan gerak pemerintah daerah menjadi terbatas dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan di daerah. Namun di sisi lain, pola hubungan yang terbentuk antara Federasi Serikat Buruh Karya Utama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dapat diidentifikasi melalui sikap keduanya yang saling terbuka dan mendukung guna kepentingan menciptakan kesejahteraan sosial bagi buruh dan masyarakat umum.

Dalam strategi perjuangannya, FSBKU menggunakan jalur litigasi dan jalur non-litigasi secara bersamaan. Adapun tahapan jalur non-litigasi yang dilakukan secara bertahap dengan melakukan propaganda, diskusi, konsolidasi, dan puncaknya aksi massa. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan kepada pihak terkait ketika menyampaikan tuntutan. Dalam perjuangannya, FSBKU juga mengedepankan program buruh pengacara sehingga serikat buruh di level basis juga mampu bergerak dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri dengan tetap didukung oleh federasi.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan terkait pola hubungan yang terbentuk antara gerakan buruh FSBKU dengan pemerintah daerah. Pola hubungan yang terbentuk cenderung inklusif dan akomodatif. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan strategi perjuangan yang dilakukan FSBKU dalam memperjuangkan kepentingan buruh di Kabupaten Tangerang.

Kata Kunci : Gerakan Buruh, Pemerintah Daerah, Pola Hubungan, Strategi Perjuangan

SUMMARY

The Law of Employment No. 13 of 2003 is a legal protection for the practice of industrial relations in Indonesia. However, after the enactment of the law, labor conditions did not merely improve. Work flexibility which is one of the spirit of the law then creates new problems, especially in the form of work and wage systems through PP No. 78 of 2015 concerning Wages. Moreover, the role of local governments in dealing with these problems also seems minimal. On the other hand, workers also pressured the government to be able to deal with problems quickly and effectively. The existence of labor interests directed at the government then causes interaction between them. Therefore, this research has a focus to describe the pattern of relationships that exist between the labor movement and the government. This study uses qualitative research methods with a phenomenological approach.

The results of this study indicate that the role of regional governments in dealing with labor problems in the regions is limited since the division of authority regulated in Law Number 13 of 2014 concerning Regional Government. This limitation of authority causes the local government to be limited in the resolution of labor problems in the region. But on the other hand, the pattern of relations formed between Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) and Tangerang District Government can be identified through the attitude of the two who are mutually open and supportive in the interest of creating social welfare for workers and the general public.

In its struggle strategy, FSBKU uses the litigation pathway and the non-litigation path simultaneously. The stages of the non-litigation path are carried out in stages by conducting propaganda, discussion, consolidation, and culminating in mass action. This is done to put pressure on the related parties when submitting demands. In its struggle, FSBKU has also put forward the lawyer labor program so that labor unions at the base level are also able to move and solve problems independently while still being supported by the federation.

This study answers questions related to the pattern of relationships formed between the FSBKU labor movement and the local government. The pattern of relationships that are formed tends to be inclusive and accommodating. In addition, this study also describes the strategy of struggle carried out by FSBKU in fighting for the interests of workers in Tangerang Regency.

Keywords : *Labor Movement, Local Government, Pattern of Relationship, Struggle Strategy*